

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanganan masalah lingkungan sebagai isu global minim dibahas dalam perspektif Hubungan Internasional. Padahal, jika melihat faktor yang melatarbelakangi suatu proses pengambilan keputusan suatu negara dalam sektor tata kelola lingkungan hidup yang identik dengan kepentingan nasionalnya, selalu memiliki konsekuensi atau dampak terhadap negara lainnya. Hal ini terjadi karena adanya sebuah pola hubungan aksi-reaksi antar negara. Alih-alih suatu negara memiliki kepentingan nasional berupa motif sosial-ekonomi melalui aktivitas perdagangan internasional, seperti halnya kebijakan larangan impor sampah oleh Pemerintah Cina tahun 2019 lalu, membuat negara lain merasakan dampak degradasi lingkungan dan merespon tindakan tersebut. Konsekuensi berupa pencemaran lingkungan di Amerika Serikat beserta respon dalam upaya mengatasi isu tersebut merupakan sorotan penulis dalam penelitian ini.

Selama beberapa dekade terakhir, negara-negara adidaya penguasa industri manufaktur dunia termasuk salah satunya Amerika Serikat telah rutin melakukan kegiatan ekspor sampah bekas produk industrinya ke Cina. Amerika Serikat pada awalnya mengekspor sampah ke Cina karena banyak segmen perusahaan di sana yang bergerak dalam bidang bisnis produk daur ulang termasuk dari jenis limbah

padat.¹ Perusahaan-perusahaan di Cina pada awalnya memiliki permintaan yang tinggi terkait pasokan limbah padat dalam jumlah besar dari Amerika Serikat untuk didaur ulang menjadi produk baru.

Negara maju yang notabene merupakan penguasa industri manufaktur dunia seperti Amerika Serikat tersebut menjadikan Cina sebagai destinasi utama ekspor sampah hasil industrinya, karena tenaga kerja di sana lebih murah dari pada di negaranya sendiri. Namun, sejak Januari 2019 lalu Pemerintah Cina menerapkan kebijakan baru bertajuk “*The National Sword Policy*” sebagai wujud aksi proteksi diri dengan dalih kekhawatiran terkait kontaminasi dan polusi yang dapat membahayakan warga negaranya. Sehingga Cina memutuskan untuk tidak lagi membeli sampah daur ulang dari Amerika Serikat, terutama sampah plastik dengan alasan bahwa sampah tersebut tidak punya kadar kemurnian 99,5%.²

Amerika Serikat sejatinya telah menetapkan kegiatan ekspor sampah plastik ke Cina sebagai agenda rutin dalam rangka mengurangi sampah bekas dari hasil produk industrinya. Hal tersebut juga bertujuan untuk menjadikan sampah sebagai suatu bentuk entitas bisnis ekonomi mikro, berupa produk daur ulang sebagaimana

¹ Sebayang, R. 2018. *Cina Berhenti Jadi Penampung Sampah Dunia Kebingungan*. [daring] tersedia dalam laman <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180417142645-4-11310/Cina-berhenti-jadi-penampung-sampah-dunia-kebingungan> diakses pada 12 Oktober 2020.

² BBC News. 2019. *Sampah plastik: Mengapa sejumlah negara memulangkan limbah ke negara pengirim?*. [daring] tersedia dalam laman <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-48849613> diakses pada 13 Oktober 2020.

yang ditetapkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau *United States Environmental Protection Agency* (US-EPA) selama beberapa dekade.³

Data Biro Sensus Amerika Serikat menunjukkan bahwa ekspor sampah ke Cina telah dimulai sejak tahun 1992.⁴ Kegiatan tersebut bertujuan untuk meminimalisir pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah atau limbah hasil produk industri manufaktur di negaranya. Tahun 2019 merupakan langkah awal Cina melarang sebagian besar impor sampah atau limbah padat dari Amerika Serikat, sehingga membuat pemangku kebijakan di beberapa negara bagian Amerika Serikat mulai berpikir kembali apa yang harus dilakukan pada tumpukan limbah daur ulang di negara mereka.

The National Sword Policy adalah kebijakan pemerintah Cina berupa larangan terhadap aktivitas impor sampah dari negara lain yang meliputi jenis limbah padat, plastik, dan sejenisnya. Kebijakan ini sebenarnya sudah mulai diumumkan pada bulan Juli 2017, dan secara resmi mulai diberlakukan pada 1 Januari 2019 terhadap Amerika Serikat.⁵ Kebijakan ini dinilai merugikan bagi Amerika Serikat dalam konteks isu lingkungan hidup maupun sosial-ekonomi, dan mendorong pemerintah Amerika Serikat untuk mengambil respon atas keputusan

³ Setyani, M. 2019. *Analisis Ekspor dan Impor Limbah Padat Antara Cina dan Amerika Serikat: Operation Green Fence (2013) dan Operation National Sword (2018)*, Verity - UPH Journal of International Relations; Faculty of Social and Political Science, Pelita Harapan University. Pp. 61.

⁴ Sonia, V. 2019. *Tanggung Gugat Negara dalam Penyelundupan Sampah Plastik (Plastic Waste Dumping) Di Indonesia*, IR-Digilib, Unair. [daring] tersedia dalam laman <http://repository.unair.ac.id/95625/3/3.%20BAB%20I.pdf> diakses pada 13 Oktober 2020.

⁵ CET (Center For EcoTechnology). 2019. *What is the National Sword?*. [daring] tersedia dalam laman <https://www.centerforecotechnology.org/what-is-the-national-sword/#:~:text=You%20may%20have%20heard%20the,contamination%20limits%20on%20recyclable%20materials> diakses pada 13 Oktober 2020.

Cina tersebut. Permasalahan lingkungan hidup menjadi penting dalam aspek hubungan internasional karena bersifat transnasional, di mana kerusakan lingkungan di suatu negara akan berdampak pula bagi wilayah atau negara di sekitarnya.⁶

Keputusan Cina dalam *National Sword Policy* berdampak pada degradasi lingkungan di Amerika Serikat, yang berpotensi mempengaruhi wilayah atau negara di sekitarnya. Hal ini terjadi ketika Amerika Serikat sudah kehilangan pasar utama ekspor sampahnya yaitu Cina, di mana mereka masih bergantung pada Cina dalam tujuan ekspor sampah atau limbah industri.⁷ Pada dasarnya, sebuah negara telah mengabaikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup dan cenderung lebih mementingkan aspek ekonomi dengan melibatkan proses politik dan sosial-ekonomi di dalamnya, di mana aktivitas tersebut merupakan rangkaian dari ekonomi politik internasional.

Tingkat kontaminasi di Amerika Serikat tinggi karena limbah sering kali dibuang ke satu tempat sampah yang sama tanpa menggunakan metode *multi-streaming* atau memilah-milah bahan yang dapat didaur ulang dan tidak dapat didaur ulang.⁸ Secara fisik, polusi dan pencemaran lingkungan di Amerika Serikat terjadi karena suatu proses produksi melalui industrialisasi dalam skala besar yang

⁶ Hartati, A. 2012. *Global Environmental Regime :di Tengah Perdebatan Paham Antroposentris Versus Ekosentris*. [daring] tersedia dalam <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/download/471/593> diakses pada 13 Oktober 2020.

⁷ *Ibid.*

⁸ Bergamini, R. 2019. *Hard Choices Needed to Save Recycling*. [daring] tersedia dalam <https://www.crainsnewyork.com/op-ed/hard-choices-needed-save-recycling> diakses pada 14 Oktober 2020.

umumnya menghasilkan limbah. Secara ekonomi, polusi ditimbulkan oleh aktivitas produksi yang melibatkan unsur kontaminasi sebab hal tersebut memiliki biaya lebih murah dari pada aktivitas produksi tanpa melibatkan unsur kontaminasi atau produksi secara bersih.⁹

National Sword Policy memaksa Amerika Serikat untuk memikirkan kembali semua limbah yang telah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di negaranya. Keputusan tersebut menimbulkan konsekuensi yang serius bagi permasalahan isu lingkungan hidup di Amerika Serikat, sebab mereka sudah tidak memiliki tempat untuk mengirim dan mengolah limbah-limbah hasil industrinya, yang berpotensi dapat menciptakan pencemaran dan kerusakan bagi lingkungan hidup di Amerika Serikat. Menurut data yang dilansir oleh *United States Environmental Protection Agency* (US-EPA) 2014, sebelum diterapkannya kebijakan *National Sword* saja sudah memperlihatkan bahwa jumlah sampah yang diperoleh dari tempat pembuangan akhir (TPA) di beberapa negara bagian Amerika Serikat sangat tinggi, yang umumnya terdiri dari beberapa jenis sampah rumah tangga. Rata-rata orang Amerika membuang sampah 4,4 pon atau 1,99581 kilogram sampah setiap hari.¹⁰

Hal tersebut menjelaskan bukti bahwa persoalan sampah sebagai isu lingkungan di Amerika Serikat merupakan konsekuensi serius yang diperoleh pasca keputusan pemerintah Cina menerapkan *National Sword Policy*. Merujuk pada

⁹ Sebayang, R. *Op. Cit.*

¹⁰ US-EPA; SaveOnEnergy. 2014. *Land of Waste: American Landfills and Waste Production*. [daring] tersedia dalam laman <https://www.saveonenergy.com/land-of-waste/> diakses pada 14 Oktober 2020.

pandangan kaum environmentalis bahwa struktur politik, sosial, ekonomi, dan normatif dari politik internasional yang ada memiliki konsekuensi bagi lingkungan hidup masyarakat global. Sehingga upaya dalam memperbaiki masalah degradasi lingkungan dalam struktur tersebut menjadi fokus utamanya. Hal tersebut berbeda dengan politik hijau (*Green Politic*) yang memandang struktur politik internasional sebagai sumber utama dari krisis lingkungan dan menetapkan struktur tersebut sebagai objek yang perlu diuji atau diperbaiki.¹¹

Sebelum melakukan penelitian lebih dalam, penulis melakukan *literature review* dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel bebas, variabel terikat, dan korelasi antar kedua variabel tersebut. Penulis menyusun kerangka untuk mengklasifikasikan sumber – sumber data dan informasi umum yang dikaji dalam penelitian.

Pertama, penelitian Rami Alademi, yang berjudul “*The National Policy of China and its Effect on Global Policy*” (2020). Penelitian ini menjelaskan jika Cina menerapkan kebijakan proteksionisme dalam bentuk *National Sword Policy*. Cina yang merupakan negara adidaya penguasa pasar produksi dunia memutuskan untuk melarang negaranya melakukan impor limbah padat dari negara lain. Lima Anggota WTO Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Kanada, dan Korea mulai kewalahan dalam mengatasi masalah penumpukan sampah plastik di negara mereka pasca diberlakukan kebijakan pedang (*Sword Policies*). Kebijakan ini diberlakukan sebab Cina sadar bahwa hal tersebut tidak akan mempengaruhi segmen pasar bagi produk

¹¹ Burchill, S. & Linklater, A. 1996. *Teori-Teori Hubungan Internasional*. [terj. M. Sobirin] Nusa Media (5). Pp. 337

ekspornya. Salah satu dampak dari kebijakan tersebut ialah pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat penumpukan limbah di negara – negara besar produsen limbah.¹²

Kedua, penelitian oleh Meilisa Setyani, yang berjudul “Analisis Ekspor dan Impor Limbah Padat antara Cina dan Amerika Serikat: *Operation Green Force* 2013 dan *Operation National Sword*” (2018). Penelitian ini menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan di Cina sangat buruk. Kebijakan larangan impor limbah padat oleh Cina diberlakukan karena adanya pemahaman bahwa identitas negara Cina di bidang lingkungan lebih penting, jika dibandingkan dengan adanya kepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sifatnya sementara dan dapat memberikan dampak negatif pada Cina. Munculnya kepentingan ini dilatar belakangi adanya faktor lingkungan yaitu beberapa pencemaran di udara, air, dan tanah di Cina, yang menyebabkan munculnya faktor kesehatan di mana banyak sekali penyakit dan bahkan kematian yang disebabkan oleh tereksposnya manusia terhadap pencemaran.¹³

Ketiga, Publikasi Ilmiah karya Wynston Lee, *The University of Sydney* yang berjudul “*Australia’s Waste Crisis: Circular Economy Responses to the Contradictions of Capitalism*” (2019). Publikasi ilmiah ini menjelaskan bahwa

¹² Alademi, R. 2020. *The National Sword Policy of Cina and its Effect on Global Policy*. University of Ankara. [Daring] tersedia dalam laman https://www.researchgate.net/profile/Rami_Alademi2/publication/340439578_The_National_Sword_Policy_of_Cina_and_its_Effect_on_Global_Policy/links/5e8926814585150839c0ce35/The-National-Sword-Policy-of-Cina-and-its-Effect-on-Global-Policy.pdf?origin=publication_detail. Diakses pada 19 November 2020.

¹³ Setyani, M. 2018. *Analisis Ekspor Dan Impor Limbah Padat Antara Cina Dan Amerika Serikat: Operation Green Fence 2013 dan Operation National Sword*. Universitas Pelita Harapan. [Daring] Tersedia dari laman <http://repository.uph.edu/id/eprint/6750>. Diakses pada 14 November 2020.

Australia dilanda krisis lingkungan akibat *National Sword Policy*. Komite Senat Australia menemukan fakta bahwa industri daur ulang sampah di Australia telah dilanda krisis. Hal tersebut karena adanya penerapan kebijakan pembatasan impor limbah oleh Cina yang ketat sejak Januari 2018 yang disebut sebagai kebijakan "*Cina National Sword' (CNS)*". Bahan limbah yang pada dasarnya merupakan penghasil produk ekonomi mikro baru di Australia terhenti akibat dari kebijakan Cina tersebut. Limbah sebagai "eksternalitas" (dampak yang tidak dapat dipilih atau ditolak oleh pihak ketiga) menyebabkan kerusakan sosial-ekonomi dan lingkungan secara langsung di Australia.¹⁴

Keempat, penelitian Dimas Ahmad Sanubari, yang berjudul "Respon Amerika terhadap Kebijakan Larangan Impor Sampah Daur Ulang Tiongkok" (2020). Penelitian ini menjelaskan bahwa Amerika merespon *National Sword Policy China* dengan menggunakan kebijakan tariff. Kebijakan tariff yang dimaksud adalah membebaskan tariff yang tinggi saat produk Cina masuk ke Amerika. Berdasarkan pandangan Merkantilisme, kebijakan tariff berguna untuk meningkatkan perekonomian Amerika, terutama untuk menyaingi perekonomian Cina. Kebijakan tariff juga berguna untuk mempertahankan kondisi perdagangan agar tetap menguntungkan bagi Amerika.¹⁵

¹⁴ Lee, W. 2019. *Australia's waste crisis: Circular economy responses to the contradictions of Capitalism*. The University of Sydney. [Daring] Tersedia dari laman https://www.researchgate.net/profile/Wynston_Lee/publication/334656909_Australia%27s_waste_crisis_Circular_economy_responses_to_the_contradictions_of_capitalism/links/5d38961892851cd046842411/Australias-waste-crisis-Circular-economy-responses-to-the-contradictions-of-capitalism.pdf?origin=publication_detail. Diakses pada 19 November 2020.

¹⁵ Sanubari, D. 2020. *Respon Amerika Serikat Terhadap Kebijakan Larangan Impor Sampah Daur Ulang Tiongkok*. Universitas Airlangga. [Daring] Tersedia dari laman

Kelima, penelitian karya Emma Luczak, *Carthage College* yang berjudul “*The Effects of China’s National Sword Policy on the United States Recycling System and What the United States can do with the Buildup of Recycling in the Recycling Centers*” (2020). Penelitian ini menjelaskan jika Amerika memiliki 3 opsi untuk mengatasi limbah yang berlebihan. Opsi A: Amerika dapat mempromosikan daur ulang dan mencoba meningkatkan sistem yang sudah ada. Banyak orang tidak paham tentang apa yang didaur ulang. Hal ini menyebabkan banyak sampah yang tidak dapat didaur ulang berakhir di tempat sampah daur ulang. Opsi B: Tetap melakukan daur ulang, tetapi juga melakukan kampanye untuk mengurangi limbah yang dihasilkan agar tidak membebani sistem di Amerika. Opsi C: Memilih untuk tidak mendaur ulang sama sekali. Produk membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, tetapi masih banyak ruang Tempat Pembuangan Sampah yang tersedia.¹⁶

Keenam, jurnal ilmiah karya Yusril Ihza Ali, yang berjudul “Lingkungan dan Globalisasi: Solusi akan Relasi yang Problematis Studi Kasus Peningkatan Sampah Impor Indonesia Pasca *National Sword Policy China* Tahun 2018” (2020). Jurnal ilmiah tersebut membahas tentang meningkatnya limbah produksi di Indonesia akibat Amerika dan negara produsen limbah lainnya melakukan pengalihan limbah ke Indonesia. Isu masalah lingkungan menjadi lebih buruk

http://repository.unair.ac.id/87586/5/JURNAL%20SKRIPSI_DIMAS%20RAHMAD%20SANUBARI_0711233043.pdf. Diakses pada 14 November 2020.

¹⁶ Luczak, Emma. 2020. *The Effects of Cina’s National Sword Policy on the United States Recycling System and What the United States can do with the Buildup of Recycling in the Recycling Centers*. Carthage College. [Daring] Tersedia dari laman https://dspace.carthage.edu/bitstream/handle/123456789/9658/Luczak_Thesis_Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Diakses pada 15 November 2020.

ketika Cina membuat kebijakan bertajuk “*National Sword Policy*” pada tahun 2018. Salah satu dampak dari kebijakan ini adalah peningkatan limbah impor di Indonesia akibat dari pengalihan sampah dari negara-negara pengeksport terutama Amerika, yang membuat pemerintah Indonesia mengambil keputusan berbeda dalam rangka mengubah haluan kebijakannya luar negerinya terkait sampah impor.¹⁷

Penelitian terdahulu di atas merupakan penelitian yang berfokus pada isu lingkungan hidup dalam perspektif ilmu Hubungan Internasional. Korelasi atau hubungan antara penelitian-penelitian terdahulu di atas dengan penelitian penulis dengan judul “Pencemaran Lingkungan Amerika Serikat sebagai Konsekuensi *National Sword Policy* Tahun 2019” di sini adalah sama-sama membahas isu lingkungan global sebagai unit analisa (*variabel dependent*) dan *The National Sword Policy* sebagai Unit eksplanasi (*variabel independent*).

Sebuah kesepakatan bersama atau konsensus yang dihasilkan ialah adanya kepentingan nasional Cina dalam aspek sosial-ekonomi yang membuatnya mengambil kebijakan proteksionis berupa larangan impor sampah dari negara lain bertajuk *National Sword Policy* dengan dalih melindungi kesehatan warga negaranya. Asumsi yang mendasari keputusan tersebut ialah bahwa kebijakan *National Sword* tidak akan mempengaruhi segmen pasar bagi produk ekspor Cina ke luar negeri dalam konteks perdagangan internasional. Adapun perbedaan fokus

¹⁷ Ali, Yusril Ihza. 2020. *Lingkungan dan Globalisasi: Solusi akan Relasi yang Problematis Studi Kasus Peningkatan Sampah Impor Indonesia Pasca National Sword Policy Cina Tahun 2018*. Universitas Pembangunan Nasional. [Daring] Tersedia dari laman <http://www.ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/download/2174/1629>. Diakses pada 19 November 2020.

penelitian-penelitian terdahulu di atas ialah terkait dengan batasan waktu, dan jangkuan penelitian.

Penulis di sini akan berfokus pada upaya pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi pencemaran lingkungan di negaranya sebagai bentuk respon atas pemberlakuan kebijakan *National Sword* oleh pemerintah Cina dengan batasan waktu tahun 2019 menggunakan metode deskriptif. Asumsi yang mendasari penulis dalam menggunakan metode deskriptif kerana permasalahan isu lingkungan yang dibahas merupakan sebuah rangkaian peristiwa atau fenomena yang dapat dijelaskan menggunakan dasar konsep keilmuan dalam Hubungan Internasional.

Melalui uraian di atas, penulis akan berfokus terhadap dampak dari Keputusan *National Sword Policy* yang merupakan bentuk aksi proteksionisme Cina dalam perdagangan internasional tahun 2019, terhadap pencemaran lingkungan di Amerika Serikat. Sekaligus menjadi penting dalam membahas respon berupa upaya pemerintah Amerika Serikat dalam menangani masalah pencemaran lingkungan hidup di negaranya, pasca diberlakukannya keputusan *National Sword Policy* tersebut, dengan berlandaskan konsep *Environmental Policy* sebagai perspektif dalam Hubungan Internasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengajukan pokok permasalahan “Apa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2018 dalam menangani pencemaran lingkungan di negaranya sebagai konsekuensi atas keputusan *National Sword Policy*?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak atau konsekuensi yang ditimbulkan atas keputusan proteksionisme Cina melalui *National Sword Policy* yang mempengaruhi isu lingkungan hidup berupa pencemaran di Amerika Serikat pada tahun 2019, beserta respon upaya pelestarian lingkungan akibat pencemaran tersebut.

1.3.2 Manfaat Penelitian

- a) Secara teoretis, penelitian ini bermanfaat bagi penulis, dalam rangka pengembangan kajian ilmu Hubungan Internasional terkait upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dalam menghadapi pencemaran lingkungan di Amerika Serikat sebagai akibat dari kebijakan *National Sword* yang dibuat oleh Pemerintah Cina pada tahun 2019.
- b) Manfaat praktis, sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana strata satu dalam program studi Hubungan Internasional.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

1.4.1.1 Konsep *Environmental Policy*

Environmental Policy (kebijakan lingkungan) merupakan konsep tentang tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, organisasi publik atau swasta, dan pihak terkait lainnya mengenai efek aktivitas manusia terhadap lingkungan, terutama tindakan yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi efek berbahaya dari aktivitas manusia pada ekosistem. Kebijakan lingkungan diperlukan sebab nilai lingkungan (*environmental value*), pada umumnya tidak dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan sebuah aktor dalam hubungan internasional, baik aktor *state* yaitu negara, maupun *non-state* yaitu perusahaan (TNC) dan organisasi (IGO/NGO). Menurut Garrett Hardin, ada dua alasan utama kelalaian masyarakat internasional terkait dengan isu lingkungan tersebut. Alasan pertama, dampak lingkungan yang merupakan eksternalitas dari ekonomi. Kedua, sumber daya alam selalu dihargai rendah karena seringkali dianggap memiliki ketersediaan yang tidak terbatas.

Munculnya penyakit Minamata pada tahun 1956 di Jepang, yang diakibatkan oleh pelepasan merkuri dari perusahaan kimia terdekat, dan publikasi *Silent Spring* (1962) oleh Rachel Carson seorang ahli biologi Amerika Serikat, di mana dia menyoroti bahaya pencemaran, telah menyebabkan kesadaran publik yang lebih besar terhadap isu lingkungan di beberapa negara industri. Dalam peraturan tersebut, pemerintah melarang penggunaan bahan berbahaya atau tingkat

emisi maksimum yang ditentukan dari bahan tertentu untuk memastikan kualitas lingkungan minimum. Sistem ini terkait upaya dalam mencanangkan program air bersih dan udara bersih yang diberlakukan di Amerika Serikat, di mana mereka berhasil menangani beberapa sumber titik polusi secara efektif, seperti pabrik dan utilitas industri, dengan melibatkan peran antar aktor yang terlibat seperti pemerintah dan perusahaan terkait. Berbagai instrumen telah dikembangkan untuk mempengaruhi perilaku para aktor yang berkontribusi pada masalah lingkungan. Secara tradisional, teori kebijakan publik berfokus pada regulasi, insentif keuangan, dan informasi sebagai alat pemerintah.¹⁸

Selama beberapa dekade, berbagai prinsip telah dikembangkan untuk membantu pembuat kebijakan dalam menangani isu lingkungan. Contoh prinsip terkait dengan kebijakan masalah pencemaran lingkungan tersebut, beberapa di antaranya telah memperoleh dasar hukum di beberapa negara, seperti halnya prinsip regulasi “pencemar membayar (*polluter pays*)”, para pencemar harus bertanggung jawab atas biaya kerusakan atau pencemaran lingkungan yang diperbuat dengan prinsip yang menyatakan bahwa suatu kegiatan dilarang, ketika ada kemungkinan konsekuensi terhadap pencemaran lingkungan. Terdapat beberapa instrumen penting bagi para pengambil keputusan yang notabene membuat mereka abai pada isu lingkungan. Keputusan biasanya didasarkan pada analisis biaya-manfaat (ekonomis), di mana biaya dan manfaat lingkungan tidak diperhitungkan atau diabaikan. Dengan dampak kerusakan yang ada, beberapa negara industri mulai

¹⁸ Britannica. 2020. *Environmental Policy, Global Policy Agreements*. [daring] tersedia dalam <https://www.britannica.com/topic/environmental-policy/Global-policy-agreements>, diakses pada 15 November 2020.

mempertimbangkan kembali keputusan mereka yang dapat berdampak pada masalah lingkungan di negaranya. Salah satunya ialah menggunakan instrumen *The Environmental Impact Assessment* (EIA) atau analisis mengenai dampak lingkungan. Dengan penerapan instrumen EIA ini, dapat membuat para pengambil keputusan (*decision maker*) untuk memasukkan atau mempertimbangkan aspek lingkungan dalam analisis biaya-manfaat terkait aspek sosial-ekonomis dalam hal industrialisasi di negaranya, sehingga dapat mengurangi dampak negatif bagi lingkungan.¹⁹

Penetapan kebijakan lingkungan atau *Environmental Policy* telah dilakukan di beberapa negara dan organisasi internasional seperti halnya Uni Eropa sebagaimana yang dikemukakan oleh Conelly dan Smith pada tahun 2003. Adapun prinsip dalam pelaksanaan atau penetapan dari kebijakan lingkungan (*Environmental Policy*) yaitu pemberitahuan dini (*precautionary principle*), integrasi kebijakan lingkungan, dan pemeliharaan standar lingkungan.²⁰ Penetapan kebijakan lingkungan atau *Environmental Policy* tidak hanya dikhususkan terhadap pemerintah selaku pengambil keputusan, akan tetapi harus diikuti oleh kepatuhan dan peran dari perusahaan-perusahaan industri. Peran perusahaan dilakukan untuk memastikan dan mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan sebagai prioritas utamanya guna membangun daya saing di sektor bisnis.²¹

¹⁹ Britannica. *Loc.Cit.*

²⁰ Adiwibowo, S. 2007. *Bedah Buku: Politic and The Environment*. [daring] tersedia dalam <https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/5933/4610>, diakses pada 15 November 2020.

²¹ Sonikhk. 2020. *Sonik's Environmental Policy – Implementation Plan*. [daring] tersedia dalam http://www.sonikhk.com/eng/img/doc/c2_23_1.pdf, diakses pada 15 November 2020.

Kebijakan lingkungan (*Environmental Policy*) mengatur regulasi yang berkaitan dengan pelestarian isu lingkungan dengan rencana upaya perlindungan terhadap lingkungan, yang disebut dengan *Environmental Protection Implementation Plan* (EPIP) atau Rencana Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan. Maksud dari program ini ialah menuntut perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor industri untuk bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan dan kesinambungan lingkungan/ *sustainable environment development* (berkaitan dengan kegiatan industrinya). Tuntutan ini diberlakukan utamanya bagi pihak manajemen atau staff terkait yang memiliki tanggung jawab penuh atas hal ini. Lebih lanjut menurut R.C Holland dalam *Environmental Protection Implementation Plan* tahun 1999, menyebutkan bahwa tuntutan juga berlaku bagi tiap karyawan yang bekerja dalam sebuah perusahaan (industri) terkait.²² Selain itu, pemerintah juga bisa menyiapkan berbagai jenis regulasi lainnya yang dirasa dapat mengurangi pencemaran lingkungan di negara, salah satunya pengalihan sampah yang ada di suatu produsen sampah ke negara lain yang tidak memiliki jumlah produksi sampah yang banyak.²³

Pemerintah dapat memutuskan untuk mendorong perubahan perilaku perusahaan-perusahaan dengan memberikan insentif keuangan yang positif atau negatif. Artinya, pemerintah dapat berkontribusi melalui subsidi, potongan pajak

²² R.C. Holland. 1999. Environmental Protection Implementation Plan. [daring] tersedia dalam https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/31/058/31058919.pdf diakses pada 15 November 2020.

²³ McVeigh, K., 2018. *Huge Rise In US Plastic Waste Shipments To Poor Countries Following China Ban*. [online] the Guardian. Tersedia dalam <https://www.theguardian.com/global-development/2018/oct/05/huge-rise-us-plastic-waste-shipments-to-poor-countries-china-ban-thailand-malaysia-vietnam> diakses pada 4 Januari 2021.

atas perusahaan, atau denda dan pungutan apabila melanggar ketentuan yang berlaku berkaitan dengan eksploitasi lingkungan yang masif. Insentif tersebut dapat memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan dalam difusi dan adopsi inovasi.²⁴ Dengan demikian konsep *Environmental Policy* (kebijakan lingkungan) mendukung peran pemerintah selaku aktor *state* dalam memediasi kepentingan perusahaan dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan dalam hal pembangunan lingkungan yang berkelanjutan (*sustainable environment development*).

1.4.2 Sintesa Pemikiran



²⁴ Britannica. *Loc..Cit.*

1.5 Argumentasi Utama

Berdasarkan rumusan masalah dan sintesa pemikiran di atas, penulis memiliki argumen utama yang menyatakan bahwa keputusan Cina dalam pembuatan kebijakan *National Sword Policy*, berdampak terhadap pencemaran lingkungan hidup yang sangat signifikan di Amerika Serikat, sebab Amerika tidak memiliki tempat untuk mengirimkan limbah hasil industri sehingga mengharuskan Pemerintah Amerika Serikat melakukan upaya pelestarian lingkungan di negaranya secara mandiri dalam bentuk kerjasama dengan *United States Environmental Protection Agency* sebagai instrumen dalam Kebijakan Lingkungan di Amerika

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu fenomena yang memiliki pola dan ciri karakteristik tertentu, yang dapat dijelaskan dengan landasan kerangka pemikiran, konsep, atau teori.²⁵

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana fenomena yang terjadi dapat dijelaskan dan digambarkan secara deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dari data primer

²⁵ Awwaabiin, Salma. 2021. "Pengertian Penelitian Deskriptif, Karakter, Ciri-Ciri Dan Contohnya". Dunia Dosen. <https://www.duniadosen.com/penelitian-deskriptif/>.

mengambil dari situs-situs resmi yang didukung oleh buku-buku cetak maupun jurnal ilmiah secara daring. Sementara data sekunder diperoleh dari artikel, berita, dan referensi terkait lainnya yang diambil melalui internet dengan mempertimbangkan validitasnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara empiris.²⁶

1.6.3 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif karena berupa rangkaian kebijakan yang dapat dijelaskan. Menurut Miles dan Hubbersman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus-menerus, sehingga data yang didapatkan telah mencapai titik validitas.²⁷ Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menyajikan data, mereduksi data, melakukan pembahasan serta memberikan kesimpulan diakhir.

1.6.4 Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian digunakan untuk membatasi penelitian agar data yang digunakan tetap relevan dengan topik yang dipilih dan pembahasannya tidak terlalu luas. Jangkauan ruang dalam penelitian ini adalah Pemerintah Cina dan Pemerintah Amerika Serikat, di mana penelitian ini akan membahas dampak kebijakan “*National Sword Policy*” terhadap pencemaran lingkungan di Amerika Serikat, beserta respon berupa upaya yang dilakukannya. Karena Amerika Serikat sudah

²⁶ "Metode Pengumpulan Data Untuk Penelitian Kualitatif". 2021. Kumparan. <https://kumparan.com/berita-update/metode-pengumpulan-data-untuk-penelitian-kualitatif-1ulC1e6f8q0#:~:text=Pada%20penelitian%20kualitatif%20ada%20empat,dalam%20uraian%20di%20bawah%20ini.>

²⁷ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:Alfabeta. Pp. 308.

sejak lama bergantung terhadap Cina sebagai tempat pengolahan limbah bagi sampah hasil industrinya.

Sedangkan untuk jangkauan waktu penelitian ini dibatasi mulai tahun 2018 hingga 2021. Alasan yang mendasari penulis dalam mengambil batasan atau jangkauan waktu tersebut karena momentum yang paling penting berkaitan dengan timbulnya konsekuensi pencemaran lingkungan di Amerika Serikat akibat pemberlakuan kebijakan *National Sword* oleh pemerintah Cina, terjadi pada rentang waktu tersebut. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan adanya beberapa data di luar jangkauan penelitian sebagai acuan atau rujukan dalam memaksimalkan analisis di dalam penelitian ini.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian secara substansi memberikan pemahaman secara terorganisasi dan penelitian mencakup dari bab 1 sampai bab 4:

BAB I. Penjelasan latar belakang masalah, memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teoretis, konseptual, argumentasi penelitian, metodologi riset penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II. Penjelasan pencemaran lingkungan di Amerika Serikat yang terjadi akibat kebijakan *National Sword* yang diberlakukan oleh Cina.

BAB III. Penjelasan posisi Cina sebagai “tempat tujuan” limbah sisa hasil produksi yang dihasilkan oleh Amerika Serikat.

BAB IV. Kebijakan dan instrumen pemerintah Amerika Serikat untuk mengatasi pencemaran lingkungan.

BAB V. Adalah penutup yang berisi kesimpulan penelitian serta saran.